

KRISIS EKONOMI BANGSA INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19

Titik Zubaidah, Yenriani, Fina Heleyneliya Putri, Nadya Pangastuti

Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau

E-mail: titixubaidah2001@gmail.com, yenayani22@gmail.com, finap752@gmail.com,
nadyawilly5@gmail.com

Abstrak

Virus Corona yang hadir di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2020 sungguh menjadi pusat perhatian. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara, bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan yang berat yang diakibatkan oleh virus tersebut, topik kali ini akan membahas Krisis Ekonomi Bangsa Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian merupakan jenis analisis data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini, dengan berbagai dampak yang terjadi pada perekonomian disebabkan oleh pandemik, yaitu terjadi nya kesusahan dalam mencari pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga banyak konflik yang di terima semua sektor perekonomian dalam beberapa bidang juga ikut merasakan dampak Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Krisis Ekonomi, Masa Pandemi

Pendahuluan

Krisis ekonomi adalah keadaan dimana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Hal tersebut disebabkan karena banyak nya hutang negara, laju inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan menurun. Krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat besar baik dari pihak pemerintah sampai ke masyarakat. Beberapa faktor biasanya ditandai oleh penurunan belanja dari pemerintah, naiknya harga pokok yang semakin melonjak, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol dan masih banyak permasalahan lainnya. Contoh nyata suatu negara yang mengalami keterlambatan pertumbuhan ekonomi selain dari faktor yang telah disebutkan yaitu, seperti keadaan negara sekarang ini, kita dihadapi dengan sebuah wabah penyakit menular yang disebut dengan virus Corona -19 yang mana hal ini menjadi kendala dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Akhir-akhir ini kita digemparkan dengan berita adanya virus yang menyebar yaitu virus corona yang berasal dari cina. virus corona ini merupakan virus pertama yang menyebar luas ke penjuru dunia, sehingga banyak menimbulkan permasalahan baik dari segi politik, ekonomi dan masalah sosial lainnya. Akibat kasus corona ini, pemerintah mulai melakukan beberapa kebijakan seperti melakukan himbauan social distancing,

work from home bagi para pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah serta membangun rumah sakit khusus untuk penanganan Covid-19. Adanya pembatasan kerja, atau bahkan banyak yang di PHK dikarenakan perusahaan tidak memiliki uang yang cukup untuk memberikan gaji kepada mereka. Akibatnya angka pengangguran akan semakin meningkat dan pemerintah pun merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara.

Metode Penelitian

Indonesia sebelumnya juga pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998. Keadaan Indonesia saat itu sangat kacau. Faktor keuangan nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Namun sekarang ini Indonesia kembali mengalami permasalahan perekonomian.

Hasil dari beberapa artikel yang kami baca, tentang seputar isu perekonomian negara terkait dengan maraknya keadaan sosial dan ekonomi saat ini yang bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Terutama keluhan dari para pekerja yang mau tidak mau harus kehilangan pekerjaan mereka dikarenakan banyaknya pemutusan hubungan kerja dan sistem kerja yang dibatasi untuk menghindari terjadinya keramaian. Maka pihak pemerintah mengambil solusi dengan menerapkan physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran mata rantai covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah itu telah mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Informasi yang didapat dari berbagai media sosial maupun fasilitas lainnya akan memudahkan kita dalam melihat atau mencari tau informasi terkini mengenai perkembangan negara kita semenjak munculnya kasus ini. Masa pemerintahan bapak Jokowi-Ma'ruf beliau menyadari bahwa perlunya penanganan yang serius dalam mengatasi krisis kesehatan, sosial dan keuangan yang disebabkan oleh pandemik Covid-19.

Pembahasan

A. Mengetahui Arti dan Pengertian Dari Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi adalah keadaan dimana perekonomian pada seseorang, sebuah wilayah, Negara ataupun dunia mengalami penurunan drastis. Misalnya apabila seseorang Di-PHK lalu tidak segera mencari pekerjaan, maka ia akan mengalami krisis ekonomi. Kebanyakan orang ingin mengatasi ekonomi adalah dengan berhutang lalu dikembalikan setelah ekonomi membaik. Sementara secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Apalagi sekarang karena Kehadiran pandemi Covid-19 telah mengubah keadaan sosial terutama di bidang keuangan ekonomi. Memasuki era new normal, kini saatnya masyarakat kembali menata kehidupan dan mulai memperbaiki kerugian akibat pandemi.

Indonesia di hadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan, ekonomi

secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi tidak memungkinkan. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar USA melemah hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia, pasar saham anjlok, mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Yang lebih memprihatinkan saat ini adalah karna Wabah Covid-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara.

Wabah COVID-19 telah mengganggu roda perekonomian global termasuk di Indonesia, beberapa usaha mengalami penurunan penjualan barang, jasa atau malah menghentikan operasi. Maka Tidaklah berlebihan jika banyak ahli ekonomi yang memprediksi bahwa Indonesia di ambang krisis keuangan. Krisis keuangan merupakan gangguan arus keuangan yang signifikan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Biasanya krisis keuangan ditandai dengan kepanikan investor menjual atau menarik aset keuangannya karena takut nilai asetnya akan terus jatuh.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi Dimasa Covid-19

Faktor penyebab terjadi nya krisis ekonomi sekarang ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, bukan hanya di negara Indonesia saja akan tetapi di seluruh dunia juga dipengaruhi oleh dampaknya, kondisi ekonomi di negeri Indonesia terlalu memperhatikan ,ekonomi secara global 2020 di perkirakan bisa jatuh seperti yang terkait peningkatan 1930 bukan lagi seperti 2008 atau 1998 ,kondisi pada saat ini juga menyebabkan kerucuhan penurunan perdagangan bahkan perdagangan sampai ke luar negeri. Di negara Indonesia sendiri ada nya beberapa faktor yang terjadi pada terhalang nya dalam proses operasi ,seperti pabrik-pabrik yang menghentikan proses operasi karena kondisi tidak memungkinkan.

Akibat dari pandemi Covid-19 ini, alam sektor rekreasi alam dan perdagangan juga mengalami kerugian diakibatkan ketidak bolehan sejumlah pemerintah untuk perjalanan keluar negeri dan penutupan beberapa sektor rekreasi alam akibat dikarenakan kurangnya orang asing dari luar negeri

Pengaruh sektor perdagangan khususnya memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri dan pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri, bahan baku dan bahan model, produksi menurun, barang langka dan harga barang selalu meningkat sampai menimbulkan kenaikan. Pengaruh krisis keuangan mengakibatkan bertambah nya kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dan terhambatnya penyelesaian persetujuan. Saat ini mungkin terlalu dini mengatakan bahwa krisis keuangan telah terjadi, namun ketidak pastian kapan berakhirnya wabah Covid-19 semakin memperbesar peluang terjadinya krisis. Bahkan banyak tantangan yang lain yaitu informasi tentang adanya krisis keuangan yang datang dari sektor yang sesungguhnya, kemungkinan besar akan

terjadi keterlambatan yang di dapatkan oleh kekuasaan yang sah dari sektor keuangan. Hal ini terjadi karena informasi dari sektor yang sesungguhnya lebih lama di kumpulkan dan biasanya dilaporkan setiap tiga bulan sekali, tidak seperti data-data di pasar pihak badan usaha yang bisa dilihat secara harian. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan penanganan dari kekuasaan yang sah.

Akibatnya pengawas lingkungan suatu usaha keuangan akan menghadapi kedudukan yang lebih menantang dan ruang kebijakan penanganan krisis yang lebih terbatas. Hal ini karena kedua krisis sebelumnya masih berada dalam jalan sempit yang menghubungkan lingkungan suatu usaha keuangan sehingga kebijakan untuk mengatasi krisis sepenuhnya berada di dalam mengatur kekuasaan yang sah/lembaga lingkungan suatu usaha keuangan.

Kali ini lembaga lingkungan suatu usaha keuangan tidak memiliki kekuatan untuk menutup penyebab krisis, yakni mengakhiri kekurangan tenaga di lingkungan suatu usaha karena ada nya Covid-19. Lembaga lingkungan suatu usaha keuangan hanya bisa berharap kepada pemerintah beserta para ahli dan tenaga kesehatan untuk segera mengakhiri pandemi ini dengan lebih cepat dan juga mengatasi pencegahan penyebaran penyakit penularan wabah agar sektor yang sesungguhnya supaya kembali bangkit. Dan akhirnya, lembaga lingkungan suatu usaha keuangan, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hanya dapat menerapkan tindakan aksi bertahan dalam bagaimana meminimalkan besarnya krisis maupun kekurangan keuangan.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan juga beberapa faktor yang akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini diantaranya adalah Government expenditure, berupa konsumsi yang menurun, serta penundaan belanja penanaman modal.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan sangat tergantung atau banyak sekali di pengaruhi oleh consumption (pembelanjaan barang maupun jasa), consumption itu mempengaruhi lebih banyak dari 56% daripada produk domestik bruto (PDB) sendiri. Namun dengan adanya kebijakan mengenai sosial distancing, work from home (WFH) sampai pembuatan sosial berskala besar (PSBB) tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat maksimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negatif.

Pandemi maupun penyakit ini memang telah memengaruhi perekonomian Indonesia cukup keras dan besar, dampaknya lebih buruk di bandingkan saat krisis ekonomi berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai mereka 2008/2009. pada Q2 2008 ekonomi Indonesia masih mampu menampung 2,4%, sementara secara keseluruhan, tahun 2008 lalu ekonomi Indonesia masih mampu menambah 6,1%.

Ekonomi di Indonesia memang masih ada nya suatu tindakan (menggeliat) walaupun melambat, pada Januari-Februari ketika covid-19 di Cina mulai menghantui Indonesia, suatu tindakan ekonomi masih ada, aktivitas ekonomi mulai melambat ketika kasus berita positif pertama di umumkan di Indonesia. Keterlambatan ekonomi makin terasa apalagi setelah PSBB di berlakukan, hanya beberapa lingkungan suatu usaha/sektor yang masih boleh di buka selama masa PSBB. Aktivitas lain yang melibatkan banyak

orang dilarang penerbangan dan jalur kereta api ditutup, inilah yang kemudian menyebabkan sektor perubahan bentuk dan fungsi dari mana pun mengalami kondisi siklus penurunan ekonomi dan perdagangan. Dan juga pada bulan maret, April, Mei, Juni hingga Agustus diwarnai dengan kelemahan ekonomi, daya beli semakin menurun, kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna untuk suatu benda maupun menciptakan benda baru yang bermanfaat terhambat, penyerap tenaga kerja tidak bisa bergerak lagi.

C. Pandangan dan Harapan Pancasila Terhadap Ekonomi

Pandangan pancasila terhadap permasalahan ekonomi yang sering terjadi dikarenakan kurang nya kesadaran, etika dan moral dalam mengatasi kesenjangan yang sangat lebar di dalam masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan ekonomi Indonesia menurut Hatta harus di arahkan bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, damai dan merdeka. Ekonomi pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban diperkuat melalui proses usaha bersama dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil yang dilandasi dengan nilai etik pertanggung jawaban kepada tuhan yang maha esa. Maka dari itu seluruh sila harus menjadi acuan kebijakan dan perilaku ekonomi rakyat Indonesia, gagasan ekonomi pancasila konsisten dengan lima sila yang menjadi dasar negara kita.

Operasional pancasila berdasarkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang maha esa memberikan pendasaran serta penekanan etika dan moral bangsa dalam perekonomian yang harus memiliki landasan etis dan pertanggung jawaban kepada tuhan .

Sila ke-2 menekankan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab maka dari segi pembangunan ekonomi harus lebih berorientasi pada keadilan dan kemajuan peradaban manusia. masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial harus diselesaikan untuk kemajuan peradaban bangsa dalam dimensi kemanusiaan.

Sila ke-3 menekan kan persatuan Indonesia, maka dengan adanya segala kebijakan ekonomi bisa memperkuat persatuan bangsa yang bercirikan ekonomi pancasila.

Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu menekankan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu, golongan dan modal.

Sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ini merupakan sila pemungkas yang sangat diharapkan agar terwujudnya bangsa yang adil dan sejahtera.

Ekonomi kerakyatan pertama kali dikenalkan oleh bapak pendiri bangsa yaitu bapak Muhammad Hatta pada tahun 1933 sebagai konsep dasar perekonomian Indonesia. Dimasa pasca reformasi pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan diperkuat dengan ketetapan majlis permusyawaratan rakyat republik Indonesia nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ini masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Diharapkan dengan

majunya ekonomi kerakyatan perekonomian Indonesia bisa lebih stabil tidak terpuruk seperti negara-negara maju yang kini mulai menghadapi resesi akibat pandemi COVID-19.

D. Solusi Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Ekonomi

Pemerintah terus berusaha melakukan berbagai cara untuk memperbaiki ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pemerintah juga berharap agar dapat berkurang nya para pengangguran. Upaya penanganan kasus ini Pemerintah pun memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT, yang mana dana tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak Covid-19. Dalam tanggap darurat pandemi Covid-19 ini presiden Jokowi memerintahkan agar dana desa dibagikan sebagian dalam bentuk bantuan langsung tunai. Hal ini segera ditindak lanjuti oleh pihak kementerian desa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa besaran alokasi BLT tiap desa berbeda sesuai dengan anggaran yang akan diterima oleh desa pada tahun anggaran 2020. Desa menerima BLT kurang lebih dari Rp 800.000.000,00. Calon Penerima manfaat BLT dana desa adalah warga kurang mampu, yang terdapat didalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kementerian sosial yang belum mendapatkan bantuan PKH, BPNT atau bantuan sejenis di masa tanggap darurat ini (sesuai SE KPK Nomor 11/2020). Hasil pendataan yang dilakukan oleh Dusun/RT/RW lalu di rekap menjadi bahan yang akan dikonfirmasi dalam musyawarah desa khusus. Apabila dalam musyawarah ini tidak ada lagi masukan dan perbaikan maka calon penerima BLT ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Setelah mendapat pengesahan camat atas nama bupati maka proses penyaluran BLT Dana desa bisa segera dilakukan.

Pemerintah juga melakukan upaya pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin, dan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020.

Pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara, dan Rp 11,5 triliun di Bank. Pembangunan Daerah. Berkat langkah tersebut penyaluran kredit perbankan mulai membaik. Terbukti hingga Rabu (22/7/2020), penyaluran kredit dari penempatan dana di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah dilakukan kepada 518.797 debitur, dengan nilai mencapai Rp 43,5 triliun.

Disisi lain dalam penyampaian pidato presiden Jokowi yaitu beliau menjabarkan sejumlah strategi yang harus dijalankan untuk menghadapi pandemi yang tengah kita

rasakan saat ini. Misalnya dibidang kesehatan dengan melakukan upaya pencegahan penyakit dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Nah, supaya ini semua dapat berjalan pemerintah akan memperkuat SDM dibidang kesehatan, kemudian melakukan pengembangan dan memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit. Perlindungan tenaga kesehatan terkhusus dalam pembelian alat pelindung diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, test kit, reagen dan ventilator. Menurut bapak Jokowi pemerintah akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial saat pandemi corona ke beberapa program, diantaranya program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, hingga keringanan tarif listrik.

Penutup

Faktor terjadinya krisis ekonomi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang tersebar di seluruh dunia. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karena banyak menimbulkan konflik seperti kekurangan ekonomi, sulitnya dalam dunia pekerjaan, terjadinya penurunan sektor, pabrik-pabrik ditutup, bahkan kericuhan adanya penurunan perdagangan sampai keluar negeri. Akibatnya dari pandemi ini mengalami kerugian besar yang mengakibatkan penutupan beberapa sektor rekreasi alam maupun penurunan yang maksimal. Pengaruh krisis keuangan akibatnya bertambahnya kesulitan untuk pembiayaan, pembayaran dan terhalangnya penyelesaian persetujuan dalam lembaga. Pada akhirnya pemerintah atau pengurus negara harus mengakhiri pandemi covid-19 ini atau harus mengatasi penyakit tersebut.

Solusi dari pemerintah itu sendiri ialah dengan mengeluarkan bantuan langsung tunai yang disingkat dengan BLT, yang mana dana tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang sangat membutuhkan akibat dampak Covid-19.

Dalam hal ini pemerintah pun memberlakukan sistem PSBB (pembatasan sosial berskala besar) sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai persebaran Covid-19 ini. Masyarakat pun di himbau agar mengutamakan kesehatan, dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar perekonomian kembali normal dan terutama untuk kita semua supaya bisa beraktifitas kembali sebagaimana biasanya.

Bibliografi

- Sudrajat, Usep dan Suwaji. 2018. *Ekonomi Manjerial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prof Tambunan, Tulus. 2020. *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: IPB Press.
- Thoha, Mahmud. 2009. *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Universitas Michigan: Pustaka Quantum, 2002.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nainggolan, Lola Ekana dkk. 2020. *Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Baswir, Revrison. 2009. *Ekonomi Kerakayatan*. Yogyakarta: Published.

Titik Zubaidah, Yenriani, Fina Heleyneliya Putri, Nadya Pangastuti

Sakim, Emil. 1965. *Sistem Ekonomi, Ekonomi Indonesia dan Lembaga Ekonomi Dalam Kemasyarakatan nasional*. Jakarta: Erlangga.

Gunadi, Tom. 1995. *Ekonomi Pancasila*, Angkasa. Bandung: Media Kita.

Dr. dr Tandra, Hans. 2020. *Virus Corona Baru*: Erlangga.